

Analisis Sistem Inovasi Usaha Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid 19

Dion Achmad Armadi, Herman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
dionachmad@gmail.com

Abstrak

UMKM dan informal merupakan sektor usaha yang terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi dampak krisis dari pandemi Covid 19. Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini dihadapkan berbagai permasalahan. Permasalahan antara lain aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelola. Tujuan tulisan ini adalah untuk membahas tentang sistem inovasi UMKM sektor makanan di Kota Bogor dengan menggunakan perspektif sistem dinamis yang terdiri dari lima tahap analisis yaitu : *Problem Recognition*; *Problem Understanding and sistem*; *Qualitative Analysis*; *Simulation Modeling*; dan *Policy Testing and Design*. Berdasarkan hasil kajian diketahui faktor fungsi dan institusi menjadikan UMKM sektor makanan di Kota Bogor mengalami hambatan dalam mengembangkan inovasi. Faktor fungsi terkait dengan masalah finansial. Finansial faktor sangat penting guna mengembangkan inovasi usaha UMKM terutama terkait inovasi produk. Keterbatasan finansial ini menjadikan UMKM di Kota Bogor menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

Kata Kunci : pemberdayaan; umkm; kota bogor; covid 19

I. PENDAHULUAN

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak krisis dari pandemic Covid 19. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai

beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Bukti lain dari peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni kemampuan sektor ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, jumlah UMKM mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia.

Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM terdapat empat jenis kegiatan pokok yang dilakukan yaitu:

1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif,
2. Pengembangan sistem pendukung usaha,
3. Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta
4. Pemberdayaan usaha skala mikro. menyerap lebih kurang 99,45% lapangan kerja dari total sekitar 76,54 juta pekerja

Selain itu, sektor UMKM juga mampu menyediakan sekitar 57% kebutuhan barang dan jasa, 19% kontribusinya terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 2-4%. Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif

seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang. Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pengembangan usaha kecil ini diperlukan informasi yang lengkap, mudah dan cepat dapat di "akses", terutama informasi potensi suatu sektor usaha ekonomi atau komoditas untuk dikembangkan pada suatu wilayah (Kecamatan) tertentu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangannya, serta prospek pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia (BI) tidak lagi secara langsung memberikan bantuan kredit kepada Usaha Kecil, namun tetap mengambil kebijakan untuk membantu dan mendorong pengembangan usaha kecil melalui Bantuan Teknis dan Penyediaan Informasi melalui Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK), dimana salah satu subsistem dari SIPUK adalah Sistem Informasi Bisnis (SIB) yang menyajikan antara lain informasi tentang potensi dan identifikasi peluang investasi. Untuk mengatasi masalah keterbatasan modal, saat ini juga telah hadir Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Micro finance didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta. Bagaimanapun, target atau segmen micro finance senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Masyarakat miskin didefinisikan sebagai mereka petani, nelayan kecil (PNK) dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan, dengan kriteria pendapatannya maksimum setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun. Menurut Marguiret Robinson (2000), pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja melalui pinjaman dalam bentuk mikro kredit. Pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi

(*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba mengungkap peran Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.

Untuk memperoleh jawaban atas kajian utama diatas maka dilakukan kajian mengenai sistem inovasi dengan teorisasi yang bersifat deskriptif. Hal ini untuk mendapatkan jawaban bagaimana sistem inovasi sektor UMKM berada terutama untuk UMKM yang bergerak untuk industri makanan. Hal ini menjadi pijakan penting untuk menemukan landasan dasar teori yang cukup untuk menemukan jawaban bagaimana seharusnya sistem inovasi dapat meningkatkan kinerja inovasi sektor UMKM. Kedua pendekatan deskriptif dan preskriptif dalam kajian sistem inovasi sektor UMKM ini mendapat posisi yang wajar didalam Ilmu Administrasi sebagaimana pemikiran Riggs (2014) yang berpandangan bahwa pengertian epistemologis deskriptif dan preskriptif ini relative sama dengan pengertian didalam Ilmu Administrasi Publik pendekatan ini kemudian digunakan untuk memotret keberadaan UMKM sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Perspektif yang digunakan adalah sistem dinamis dimana menurut Coyle (2016) bahwa ada 5 tahap dalam analisis sistem dinamis, yaitu:

1. Problem recognition yang merupakan tahap pengenalan masalah yang dilakukan makalah ini melalui pengumpulan informasi yang berkaitan dengan situasi problematik lewat data primer maupun sekunder.
2. Problem Understanding and sistem Description yaitu tahapan dimana hasil dari pengenalan masalah pada tahap sebelumnya sangat membantu makalah ini dalam memahami permasalahan dan pola hubungan masalah dalam sebuah dinamisasi sistem. Dimana kemudian oleh makalah ini nantinya digambarkan sebuah model / diagram sistem dinamis dalam bentuk stock flow diagram (SFD).
3. Qualitative Analysis, analisis kualitatif ini merupakan tahap analisis secara kualitatif atas diagram sistem dinamis yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu melalui mengundang pakar untuk mendapatkan ide baru atau dengan melakukan diskusi mendalam dengan stakeholder yang relevan. Namun dalam makalah inian ini, proses analisis kualitatif dilakukan dengan diskusi.
4. Simulation Modeling, dimana setelah dibuat nya stock flow diagram (SFD) dan analisis kualitatif, maka dalam

tahap selanjutnya adalah membuat sebuah model sistem dinamis melalui pembuatan causal loops diagram (CLD) yang kemudian model disimulasikan.

5. Policy Testing and Design. Pada tahap ini model sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, diuji kembali dengan beberapa skenario kebijakan yang menjadi alternatif dalam memecahkan masalah yang menjadi fokus makalah ini. Dan dalam tahap ini akan didapatkan sebuah model skenario kebijakan yang paling relevan dengan dilakukannya simulasi skenario kebijakan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kewirausahaan

Kata entrepreneurship yang dahulunya sering diterjemahkan dengan kata kewiraswastaan akhir-akhir ini diterjemahkan dengan kata kewirausahaan. Entrepreneur berasal dari bahasa Perancis yaitu *entreprendre* yang artinya memulai atau melaksanakan. Wiraswasta/wirausaha berasal dari kata: Wira: utama, gagah berani, luhur; swa: sendiri; sta: berdiri; usaha: kegiatan produktif. Dari asal kata tersebut, wiraswasta pada mulanya ditujukan pada orang-orang yang dapat berdiri sendiri. Di Indonesia kata wiraswasta sering diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintah yaitu; para pedagang, pengusaha, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta, sedangkan wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri. Yaghoobi, Salarzahi, Aramesh dan Akbari (2010) menyatakan bahwa wirausahawan adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. Jong and Wennekers (2008) menyatakan bahwa kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan persaingan. Kata kunci dari kewirausahaan adalah: pengambilan risiko, menjalankan usaha sendiri, memanfaatkan peluang-peluang, menciptakan usaha baru, pendekatan yang inovatif, mandiri (misal; tidak bergantung pada bantuan pemerintah). Secara umum posisi wirausahawan adalah menempatkan dirinya terhadap risiko atas guncang-guncangan dari perusahaan yang dibangunnya (venture). Wirausahawan memiliki risiko atas finansialnya sendiri atau finansial orang lain yang dipercayakan kepadanya dalam memulai suatu. Ia juga berisiko atas keteledoran dan kegagalan usahanya. Sebaliknya manajer lebih termotivasi oleh tujuan yang dibebankan dan

kompensasi (gaji dan benefit lainnya) yang diterimanya. Seorang manajer tidak toleran terhadap sesuatu yang tidak pasti dan membingungkan dan kurang berorientasi terhadap risiko dibandingkan dengan wirausahawan. Manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dalam bekerja. Wirausahawan lebih memiliki keahlian intuisi dalam mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan perasaan dalam mengajukan sesuatu kepada orang lain. Dilain pihak, manajer memiliki keahlian yang rasional dan orientasi yang terperinci (rational and detailed-oriented skills). Wirausaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri tidak bergantung kepada pemerintah atau pihak-pihak lain dalam menghadapi segala tantangan persaingan. Inti dari kewirausahaan adalah pengambilan risiko, menjalankan sendiri, memanfaatkan peluang-peluang, menciptakan baru, pendekatan yang inovatif, dan mandiri. Baldacchino (2009) menyatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Kreativitas: kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Intinya kreativitas adalah memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Intinya inovasi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Seorang wirausahawan harus memiliki ide-ide baru yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas inilah yang membawa wirausahawan untuk berinovasi terhadap usahanya.

2. Kreativitas

Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik yaitu sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk, atau panduan yang tidak lengkap yang menuntun kita untuk mengerti, mempelajari, atau menemukan sesuatu yang baru. Atribut orang yang kreatif adalah : terbuka terhadap pengalaman, suka memperhatikan melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa, kesungguhan, menerima dan merekonsiliasi sesuatu yang bertentangan, toleransi terhadap sesuatu yang tidak jelas, independen dalam mengambil keputusan, berpikir dan bertindak, memerlukan dan mengasumsikan otonomi, percaya diri, tidak menjadi subjek dari standar dan kendali

kelompok, rela mengambil resiko yang diperhitungkan, gigih, sensitif terhadap permasalahan, lancar-kemampuan untuk men-generik ide-ide yang banyak, fleksibel keaslian, responsif terhadap perasaan, terbuka terhadap fenomena yang belum jelas, motivasi, bebas dari rasa takut gagal, berpikir dalam imajinasi, selektif. Memahami kreativitas (daya cipta) akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat modul atau perangkat tentang kewirausahaan. Peran sentral dalam kewirausahaan adalah adanya kemampuan yang kuat untuk menciptakan (to create or to innovate) sesuatu yang baru, misalnya: sebuah organisasi baru, pandangan baru tentang pasar, nilai-nilai corporate baru, proses-proses manufacture yang baru, produk-produk dan jasa-jasa baru, cara-cara baru dalam mengelola sesuatu, cara-cara baru dalam pengambilan keputusan. Suryana (2013) menyatakan bahwa kreativitas adalah: "Berpikir sesuatu yang baru". "Kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dalam menghadapi peluang". Kreativitas merupakan suatu topik yang relevan tidak hanya bagi wirausaha yang baru memulai, tetapi juga bagi bisnis dan kegiatan bisnis pada umumnya.

Kreativitas merupakan sumber penting dalam penciptaan daya saing untuk semua organisasi yang peduli terhadap growth (pertumbuhan) dan change (perubahan). A. Roe dalam Frinces (2014) menyatakan bahwa syarat-syarat orang yang kreatif yaitu:

- a. Keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience).
- b. Pengamatan melihat dengan cara yang biasa dilakukan (observance seeing things in unusual ways).
- c. Keinginan (curiosity) Toleransi terhadap ambiguitas (tolerance of apporites)
- d. Kemandirian dalam penilaian, pikiran dan tindakan (independence in judgement, thought and action)
- e. Memerlukan dan menerima otonomi (needing and assuming autonomy)
- f. Kepercayaan terhadap diri sendiri (self-reliance)
- g. Tidak sedang tunduk pada pengawasan kelompok (not being subject to group standart and control).
- h. Ketersediaan untuk mengambil resiko yang diperhitungkan (willing to take calculated risks).

3. Inovasi

Larsen, P and Lewis, A, (2017) menyatakan bahwa salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahawan adalah kemampuannya berinovasi. Tanpa adanya inovasi perusahaan tidak dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan berubah.

Pelanggan tidak selamanya mengkonsumsi produk yang sama. Pelanggan mencari produk lain dari perusahaan lain yang dirasakan dapat memuaskan kebutuhannya. Untuk itulah diperlukan adanya inovasi terus menerus jika perusahaan berlangsung lebih lanjut dan tetap berdiri dengan usahanya. Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Meskipun ide tersebut telah lama ada tetapi ini dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau merasakannya. Perusahaan dapat melakukan inovasi dalam bidang:

- a. Inovasi produk (barang, jasa, ide dan tempat).
- b. Inovasi manajemen (proses kerja, proses produksi, keuangan pemasaran, dll). Dalam melakukan inovasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menganalisis peluang,
2. Apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang,
3. Sederhana dan terarah,
4. Dimulai dari yang kecil, dan
5. Kepemimpinan

Hills (2008) mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek atau obyek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit pengguna lainnya. Suryana (2013) inovasi yaitu: "sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan". Keeh, et.al (2017) menjelaskan inovasi sangat penting karena terdapat alasan berikut:

1. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru dari pesaing, dan ini mendorong usaha entrepreneurial untuk bersaing dan sukses. Yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru.
2. Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek, yang artinya bahwa produk atau layanan lama harus digantikan dengan yang baru dalam waktu cepat, dan ini bisa terjadi karena ada pemikiran kreatif yang menimbulkan inovasi.
3. Konsumen saat ini lebih pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan. Harapan dalam pemenuhan kebutuhan mengharap lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga. Oleh karena itu skill inovatif dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan konsumen sebagai pelanggan.
4. Dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat, ide yang bagus dapat semakin mudah ditiru, dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses yang baru dan lebih baik, dan layanan yang lebih cepat secara kontinyu.

5. Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik.

4. Pengertian Usaha Kecil

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan dalam UU Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sistem Inovasi Keragaman atas pemahaman inovasi sangatlah luas, sebagai bagian dari strategi perusahaan yang tergantung konteks, konten, dan proses, maka keragaman pemahan inovasi tidak bisa dihindarkan. Konsepsi teoritis yang lebih luas dari inovasi mengakui inovasi sebagai sebuah fenomena yang lebih kompleks dan dinamis dari pada inovasi teknis, seperti yang ditemukan oleh Benner dan Tushman (2012). Namun, beberapa penulis telah memakai istilah "Inovasi" hanya untuk hasil dari proses inovasi, dan "manajemen inovasi" untuk kegiatan manajerial yang mencoba untuk mengontrol proses inovasi (Drejer, 2012) dalam Ojasalo. Schumpeter digambarkan inovasi sebagai 'perubahan bersejarah dan ireversibel dalam melakukan sesuatu', dan 'penghancuran secara kreatif'. Bagi Schumpeter inovasi dimulai ketika elemen baru atau kombinasi elemen lama dan baru mulai diperkenalkan. Definisi klasik Schumpeter bahwa inovasi menekankan pada dua aspek yaitu aspek perbuatan/proses (memperkenalkan sesuatu), dan aspek hasil (produk baru atau organisasi baru). Pada pembahasan lainnya, Schumpeter mendefinisikan inovasi produk sebagai "perkenalan komoditas baru dimana konsumen belum

mengenalnya atau komoditas dengan kualitas baru. Inovasi proses sebagai "perkenalan atas metode produksi baru yang belum pernah dicoba pada industry yang berkaitan atau cara baru menangani komersialisasi komoditi. UMKM Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada kenyataannya banyak yang mendefinisikan bermacam-macam, namun demikian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria :
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :
 1. Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. Saat ini, di Indonesia terdapat 41.301.263 usaha kecil (UK) dan 361.052 usaha menengah (UM). Kedua usaha tersebut atau dikenal sebagai Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang berjumlah 99,9% total jumlah usaha yang ada di Indonesia. UMKM tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi (pertanian, perikanan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa). UMKM juga dapat dikelompokkan atas klasifikasi pra usaha, usaha berjalan dan usaha maju. Inovasi di sini didefinisikan sebagai kreasi baru dari ekonomi secara signifikansi, terutama dilakukan oleh perusahaan. Semua perusahaan memiliki pendekatan dan metode masing-masing untuk mengembangkan ide-ide baru atau inovatif yang menciptakan nilai (value). Di banyak perusahaan teknologi, inovasi proses merupakan aktifitas makalah inian dan pengembangan (R&D). Perusahaan pelayanan sering memiliki departemen kreatifitas sedangkan yang lain masih bertumpu pada pekerja dalam memproduksi ide-ide inovatif. Pertumbuhan terkait erat dengan kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Hal ini melibatkan perubahan terus-menerus untuk produk, proses dan organisasi dan manajerial praktek.

Sistem Dinamik Analisis, mengadopsi pandangan ketat sistemik pada organisasi yang kompleks memasuki pemandangan ilmiah untuk memastikan bahwa tidak ada faktor penting dalam truktur dikeluarkan. Masalah dalam mengidentifikasi merekonstruksi mengendalikan organisasi, dengan memperhatikan tujuan, kendala dan sumber daya yang dikerjakan. Sistem dapat diklasifikasikan menurut jenis kompleksitas, sebagaimana telah dilakukan oleh Weaver (2008):

1. Dalam sistem yang terorganisir-kompleksitas (*organized-complexity sistem*), bentuk khas untuk sistem kehidupan, hanya sejumlah terbatas tapi besar komponen menentukan sistem.
2. Kompleksitas sistem tidak terorganisir (*unorganized-complexity sistem*) hanya bisa merujuk pada sistem non-hidup di mana jumlah variabel yang sangat besar dan di mana masing-masing variabel memiliki

perilaku yang sama sekali tidak terduga atau tidak dikenal.

3. Sistem terorganisir-kesederhanaan (*organizedsimplicity sistem*) ditandai oleh sistem sederhana seperti mesin dan artefak manusia lainnya hanya memiliki sejumlah kecil komponen.

Sebuah klasifikasi sistem serupa telah dibuat oleh Herbert Simon. Dia membedakan decomposable, nearly decomposable dan nondecomposable: Dalam sistem decomposable: subsistem dapat dianggap sebagai independen satu sama lain. Dalam nerally decomposable: interaksi antara subsistem lemah tapi tidak dapat diabaikan. Non decomposable: sistem secara langsung bergantung pada sistem lain atau secara eksplisit mempengaruhi mereka.

III. METODE PENELITIAN

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan sistem dinamis yang menggunakan *software vensim* dilihat dari Problem Recognition; Problem Understanding and sistem; *Qualitative Analysis; Simulation Modeling; dan Policy Testing and Design Problem Recognition*. Tahap pengenalan masalah yang dilakukan melalui pengumpulan informasi yang berkaitan dengan situasi problematik lewat data primer maupun sekunder. Dalam konteks ini problem recognition terurai dalam beberapa tahap berikut:

1. Tahap 1 Mengidentifikasi situasi masalah yang tidak terstruktur dalam konteks industri makanan UMKM di Kota Bogor secara umum.
2. Tahap 2 Mengidentifikasi situasi/masalah yang terstruktur
3. Tahap 3 Mendefinisikan akar situasi masalah

Qualitative Analysis

Analisis kualitatif ini merupakan tahap analisis secara kualitatif atas diagram sistem dinamis yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu melalui mengundang pakar untuk mendapatkan ide baru atau dengan melakukan diskusi mendalam dengan stakeholder yang relevan. Namun dalam makalah ini, proses analisis kualitatif dilakukan dengan diskusi. *Simulation Modeling* Setelah dibuatnya *Stock Flow Diagram* (SFD) dan analisis kualitatif, maka dalam tahap selanjutnya adalah membuat sebuah model sistem dinamis melalui pembuatan *Causal Loops Diagram* (CLD) yang kemudian model disimulasikan.

Policy Testing and Design

Pada tahap ini model sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, diuji kembali dengan beberapa skenario kebijakan yang yang menjadi alternatif dalam memecahkan masalah yang menjadi fokus makalah ini. Dalam tahap ini didapatkan sebuah model skenario kebijakan yang paling relevan dengan

dilakukannya simulasi skenario kebijakan sebelumnya. Pengolahan data sekunder pada tahap sebelumnya, dan FGD.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan menelaah dari hasil uji dengan menggunakan sistem dinamis yang menggunakan software vensim dilihat dari Problem Recognition; Problem Understanding and sistem; Qualitative Analysis; Simulation Modeling; dan Policy Testing and Design Problem Recognition Merupakan tahap pengenalan masalah yang dilakukan makalah ini melalui pengumpulan informasi yang berkaitan dengan situasi problematik lewat data primer maupun sekunder. Dalam konteks ini problem recognition terurai dalam beberapa tahap berikut:

1. Tahap 1 Mengidentifikasi situasi masalah yang tidak terstruktur.

Dalam konteks industri makanan UMKM di Kota Bogor secara umum memiliki beberapa masalah yaitu: UMKM memiliki kendala teknologi yaitu masih rendahnya keseragaman mutu produk dan sanitasi, terbatasnya kapasitas dan kesempatan untuk berinovasi atau mencoba teknologi baru, masalah modal, masalah infrastruktur, masalah transportasi, masalah distribusi, masalah quality control, masalah standarisasi, masalah skala ekonomi, masalah promosi, masalah akses pasar, masalah citra produk, masalah kualitas produknya, masalah ketersediaan bahan baku, masalah tidak ada branding, soal kualitas, masalah volume tidak memadai, masalah otorisasi bahan pangan, masalah penetapan batas kontaminan, masalah kerumitan sertifikasi impor maupun ekspor, masalah sistem standar label yang tidak konsisten, masalah produksi, masalah pengembangan produk, masalah control kualitas, masalah akuntansi, masalah mesin-mesin, masalah organisasi pengelolaan, masalah pemrosesan data, masalah teknik pemasaran.

2. Tahap 2 Mengidentifikasi situasi/masalah yang terstruktur Kesulitan pemasaran, hasil dari studi yang dilakukan menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

Keterbatasan finansial, UMKM di Kota Bogor menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala

serius bagi UMKM di Kota Bogor, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan makalah inian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

Masalah bahan baku, keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UMKM di Kota Bogor. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

Keterbatasan teknologi, berbeda dengan daerah lain, UMKM di Kota Bogor umumnya masih menggunakan teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UMKM di Kota Bogor untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

3. Tahap 3 Mendefinisikan akar situasi masalah, berdasarkan akar situasi masalah di atas, dapat dikatakan bahwa masalah utama pengembangan inovasi UMKM sektor makanan di Kota Bogor terkait dengan beberapa hal berikut : aspek organisasi, aspek institusi, aspek fungsi, aspek fungsi aktifitas, aspek dinamika organisasi, institusi, fungsi, dan aktifitas Problem Understanding and sistem Description Hasil dari pengenalan masalah pada tahap sebelumnya akan sangat membantu makalah ini dalam memahami permasalahan dan pola hubungan masalah dalam sebuah dinamisasi sistem. Dimana kemudian oleh makalah ini nantinya digambarkan sebuah model/diagram sistem dinamis dalam bentuk stock flow diagram (SFD).

Qualitative Analysis

Berdasarkan analisis sistem dinamis yang telah dilakukan pada tahun ke-2 diketahui bahwa model skenario yang ditemukan adalah skenario kebijakan yang menuntut keberpihakan pemerintah yang sifatnya mutlak. Pemerintah harus menyediakan modal material, intelektual dan institusional UMKM mampu bersaing dalam pasar global. Tetapi sampai sekarang ini keberpihakan pemerintah dinilai masih belum

optimal. Kebijakan dibidang perbankan merupakan salah satu bukti ketidakadilan. Kebijakan tersebut melupakan kondisi kelompok UMKM yang sebagian besar termasuk dalam katagori miskin dan berpendidikan rendah. Demikian juga dalam penggolongan atau mengelompokan usaha berdasarkan kriteria pemilikan aset dan omset yang melahirkan istilah usaha mikro, kecil dan menengah. Pengelompokan ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pemberian kesempatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kelompok usaha tersebut. Akibatnya ada kecenderungan pengelompokan ini malah mempersempit ruang gerak mereka.

Untuk menggerakkan ekonomi rakyat ini sudah waktunya memutar jarum kompas kearah pemberian kesempatan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Komitmen ini tidak saja diperlukan dikalangan pengambil kebijakan, tetapi harus menjadi komitmen semua pihak termasuk para, pakar dan praktisi. Sejalan dengan kebijaksanaan dasar KIB yang tertuang RPJM maka untuk jangka pendek dan jangka menengah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor mengeluarkan berbagai program terobosan, yang memungkinkan percepatan pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut dioperasionalkan melalui pelaksanaan berbagai program perkuatan bagi UMKM, dari berbagai aspek usahanya, mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya. Tujuan jangka pendek dari program-program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi, yang diasumsikan dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Peningkatan pendapatan selanjutnya diprediksikan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan dampak akhir mengurangi kemiskinan dan perluasan usaha, yang memungkinkan terbukanya peluang kerja baru. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah mendorong UMKM agar mampu bersaing dalam pasar global. Revitalisasi dan Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui :

1. Revitalisasi peran dan perkuatan posisi UMKM dalam Sistem perkonomian lokal dan;
2. Revitalisasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan ;
4. Mengembangkan potensi sumberdaya local.

Untuk tujuan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Bogor harus saling bekerjasama dengan kementerian terkait dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi, telah melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM yang difokuskan pada Pemberdayaan Instiusional UMKM dalam bentuk program:

1. Penyederhanaan Perizinan dan pengembangan sistem perizinan satu pintu, serta bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha;

2. Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan UMKM;
3. Penataan dan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM;
4. Pengembangan koperasi berkualitas;
5. Revitalisasi koperasi.
6. Peningkatan Akses UMKM terhadap Sumber Pendanaan
7. Pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk UMKM;
8. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro
9. Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera;
10. Program skim pendanaan komoditas UMKM;
11. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank;
12. Pemberdayaan mikro dan usaha kecil melalui program Sertifikasi Tanah;
13. Bantuan penguatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulant.
14. Pemberdayaan di bidang produksi melalui bantuan sektor usaha selektif sebagai stimulant
15. Program pengembangan usaha;
16. Program bantuan penguatan alat;
17. Program bantuan penguatan mesin dan teknologi;
18. Pengembangan Jaringan Pemasaran
19. Promosi proyek UMKM;
20. Modernisasi usaha ritel koperasi;
21. Pengembangan sarana pemasaran UMKM;
22. Pengembangan Trading Board dan Data Center;
23. Pameran di dalam dan di Luar negeri.
24. Pemberdayaan Sumberdaya UMKM
25. Penumbuhan Wirausaha baru;
26. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial UMKM;
27. Pengembangan kualitas layanan Koperasi;
28. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif;
29. Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
30. Pengkajian Makalah inian dan Pengembangan Sumberdaya UMKM:
31. Diskusi Permasalahan dan Isu-isu strategis dalam proses pemberdayaan UMKM;
32. Sosialisasi hasil-hasil kajian, makalah inian, pengembangan dan diskusi pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui penerbitan buku, jurnal dan majalah Ilmiah;
33. Pengkaderan dan Pengawasan kinerja aparat dan Sumberdaya.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa faktor fungsi dan institusi menjadikan UMKM sektor makanan di Kota Bogor mengalami hambatan dalam mengembangkan inovasi. Faktor

fungsi terkait dengan masalah finansial. Finansial menjadi faktor yang sangat penting guna mengembangkan inovasi usaha UMKM terutama terkait inovasi produk. Keterbatasan finansial ini menjadikan UMKM di Kota Bogor menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS. Faktor institusi menjadi kelemahan sekaligus menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Tanda ini juga menunjukkan bahwa dalam hubungan sebab-akibat tanda negatif ini menunjukkan faktor penyebab dari masalah yang berimbas pada masalah turunan yang lain. Hasil dari studi yang dilakukan menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor. Aspek organisasi berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UMKM di Kota Bogor, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, kontrol kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan makalah inian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa Variabel dan Parameter Penyusun Model dalam hasil analisis sistem inovasi UMKM berdasarkan sistem dinamis adalah :

1. Aspek fungsi aktifitas: Kesulitan pemasaran
Hasil dari studi yang dilakukan menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusahapengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.
2. Aspek fungsi: Keterbatasan finansial
UMKM di Kota Bogor menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

3. Aspek organisasi : Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UMKM di Kota Bogor, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan makalah inian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

4. Aspek institusi: Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UMKM di Kota Bogor. Terutama selama masa krisis, banyak sentra sentra Usaha Kecil dan Menengah mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

5. Aspek dinamika organisasi, institusi, fungsi, dan aktifitas : Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan daerah lain, UMKM di Kota Bogor umumnya masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UMKM di Kota Bogor untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

Saran

Berdasarkan temuan sementara dan simpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Perlu perbaikan terkait aspek organisasi UMKM yaitu kerjasama dan networking guna mendukung inovasi UMKM. Hal ini dilakukan oleh elemen pengusaha UMKM, pemerintah dan pihak pasar.
2. Perlu perbaikan terkait aspek institusi UMKM yaitu tentang kerjasama dan networking guna mendukung inovasi UMKM. Hal ini dilakukan oleh elemen pengusaha UMKM, pemerintah dan pihak pasar.
3. Perlu perbaikan terkait aspek fungsi UMKM yaitu kerjasama dan networking guna mendukung inovasi

UMKM. Hal ini dilakukan oleh elemen pengusaha UMKM, pemerintah dan pihak pasar.

4. Perlu perbaikan terkait aspek fungsi aktifitas UMKM yaitu kerjasama dan networking guna mendukung inovasi UMKM. Hal ini dilakukan oleh elemen pengusaha UMKM, pemerintah dan pihak pasar.
5. Perlu perbaikan terkait aspek organisasi, institusi, fungsi, dan aktifitas UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, Sauci. (2016). *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Surakarta: Kompip Solo.

Hariyono. (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2015). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Surabaya. Kementerian Koperasi dan UKM.

Draf Rencana Strategis Pembangunan Koperasi dan UMKMPeriode Tahun 2015 – 2009. Jakarta, 2014. LPPI, Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.

Narbuko, C., dan Achmadi, A. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Saheb, S., Slamet, Y., & Zuber, A. (2018). *Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur)*.

Hadiyati, E. 2010. *Pemasaran untuk UMKM (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia.

Jurnal Analisa Sosiologi, 2(1). Slamet, M. (2013). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.

Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2018). *Kemiskinan Dalam Pembangunan*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Weaver ,

Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.

Baldacchino. 2008. “Entrepreneurial Creativity and Innovation”, *The First International Conference on Strategic Innovation and Future Creation*, University of Malta, Malta.

Bjerke, B. 2015. *Managing Entrepreneurship on Whose Terms? in Research at the Marketing/ Entrepreneurship Interface*, Edited by Hills, G. and Miles, M., Chicago: University of Illinois.

Bustami, Bernadien, Sandra Nurlela & Ferry. 2017. *Mari Membangun Usaha Mandiri: Pedoman Praktis Bagi UKM*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Dony Abdul Chalid. (2015). *Suara Karya. ” Pengentasan Kemiskinan Lewat UMKM ”*. Rabu, 30 Mei 2015

Frinces, Heflin. 2014. *Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Darusalam.

Gunawan Sumodiningrat. (2013). ”Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan Otonomi Daerah “ *Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2013*

Hadiyati, E. 2010. *Pemasaran untuk UMKM (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia.

Hariyono. (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hills, Gerald. 2008. “Marketing and Entrepreneurship, Research Ideas and Opportunities”, *Journal of Small and Medium Entrepreneurships*, page: 27-39. Jong & Wennekers. 2008. “Conceptualizing Entrepreneurial Employee Behavior”, *SMEs and Entrepreneurship Programme Finance by the Netherlands Ministry of Economic Affairs*.

Keeh, Hean Tat, Mai Nguyen & Ping. 2017. “The Effects of Entrepreneurial Orientation and Marketing Information on the Performance of SMEs”, *Journal of Business Venturing*, page: 592-611.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2015). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Surabaya. Kementerian Koperasi dan UKM.

Larsen, P. & A. Lewis. 2017. “How Award Winning SMEs Manage The Barriers to Innovation”, *Journal Creativity and Innovation Management*, page: 141-151.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Jakarta: Sinar Grafika.

Rudjito. (2015). “ Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Mena nggulangi Kemiskinan

Scarborough, N.M. & T.W. Zimmerer. 2015, *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, Fourth Edition, New Jersey: Prentice-Hall.

Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (Si - Puk)